

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan tentang Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, dapat disampaikan untuk tahun 2017 terdapat 799 Organisasi Masyarakat yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, untuk Kabupaten Bantul 165 Ormas, Kabupaten Gunungkidul 119 Ormas, Kabupaten Kulonprogo 44 Ormas, Kabupaten Sleman 187 Ormas, dan Kota Yogyakarta 130 Ormas.

Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jenis pengawasan yang dilakukan untuk Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pengawasan Internal dan Eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh individu maupun lembaga yang berada didalam internal Organisasi Masyarakat, dan dilaksanakan sesuai dengan AD dan ART yang terdapat dalam Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara menerima laporan masuk, monitoring, evaluasi oleh tim terpadu, konfirmasi, kerjasama, memberikan rekomendasi. Apabila dalam hal

sengketa yang terjadi di internal maupun eksternal Organisasi Kemasyarakatan dan berpotensi menimbulkan perseteruan dan meresahkan masyarakat, maka pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan para pihak yang bersengketa.

Faktor yang mendukung pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan adalah kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) karena merupakan salah satu syarat pendirian Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan faktor penghambat dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah keterbatasan personil, minimnya anggaran, tidak adanya pemberitahuan kepada Kesbangpol apabila Organisasi Masyarakat tersebut sudah tidak aktif dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

B. Saran

Setelah mengkaji hasil pembahasan dan kesimpulan, maka akan penulis sampaikan beberapa saran untuk Pemerintah Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pengawasan segera melakukan pengawasan secara berkala, mengingat banyaknya Ormas yang tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin banyak. Agar nantinya dapat meminimalisir terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.
- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih memaksimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan, agar pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan anggaran. Karena pengawasan

lapangan secara tidak langsung membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu perlu dilakukan penambahan personil agar pengawasan dapat berjalan efektif

- c) Perbanyak mengadakan sosialisasi, talkshow dengan mengundang berbagai pengurus Organisasi Kemasyarakatan hal ini juga agar menguatkan rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air Republik Indonesia antara Organisasi Kemasyarakatan yang satu dengan yang lain.